

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ADITYA RIZKY PUTRA
0871010002

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Disusun oleh :

ADITYA RIZKY PUTRA
0871010002

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Disusun oleh :

ADITYA RIZKY PUTRA
NPM. 0871010002

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno, SH. M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001

2. Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

3. Subani, SH. MSi. : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Disusun oleh :

ADITYA RIZKY PUTRA
NPM. 0871010002

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 16 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

H. Sutrisno, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT. 37507070225

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

3.

Subani SH. M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK
YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Disusun oleh :

ADITYA RIZKY PUTRA
0871010002

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Rizky Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Desember 1987
NPM : 0871010002
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Lombok 14 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 11 Juni 2012

PEMBIMBING UTAMA

PENULIS

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19510504 198303 1 001

Aditya Rizky Putra
NPM. 0871010002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah Nya sehingga Skripsi yang berjudul: “EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN” dapat disusun serta diselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, program studi ilmu hukum, Universitas Pembangunan Nasioanal “Veteran” Jawa Timur.

Berbagai masukan, dorongan, bimbingan, sumbangan pemikiran dan pengorbanan dari berbagai pihak sangat penulis syukuri dan hargai, oleh karenanya dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan segala fasilitas yang ada di Fakultas Hukum;
2. Bapak H. Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta saran-saran kepada penulis demi suksesnya penulisan skripsi ini;

3. Bapak Drs. EC. Gendut Sukarno. Msi., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, M.Si. Selaku Ketua Program Pendidikan Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn., dalam kedudukannya sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan serta dengan penuh kekritisan pemikiran beliau telah memberikan dukungan serta koreksi dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur beserta staff untuk segala pelayanan administrasinya dan Koordinator Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan atas peminjaman buku-buku;
8. Kepada para sahabat-sahabatku tercinta Rochbini rossi, Rizky Andrian, Taufiq baihaqi, Randi Piangga, golden girl yang tetap setia memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian Skripsi;
9. Kedua orang tua dan adik-adik yang selama ini selalu mendoakan serta memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, peneliti sampaikan terima kasih atas segala dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan yang bersumber pada kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran masih penulis butuhkan demi penyempurnaan tulisan ini.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Aditya Rizky Putra
NPM : 0871010002
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 13 Desember 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar UU KUP, serta untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai kendala dalam penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 UU KUP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber data diperoleh dari buku-buku, karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan adalah Pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan juga harus ada dukungan serta peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum sehingga penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan terutama Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci : Pajak, Sanksi Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kajian Pustaka	4
A. Efektivitas.....	4
B. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Pengertian Hukum Pajak	9
3. Fungsi Pajak.....	11
4. Jenis-Jenis Pajak	14
5. Objek Pajak.....	15

6. Pihak Dalam Bidang Pajak	16
7. Pembayaran Pajak	20
8. Pengajuan Keberatan	23
9. Sanksi Perpajakan	24
10. Tata Cara Peradilan Pajak	30
1.6. Metode Penelitian	33
A. Jenis Tipe Penelitian	33
B. Sumber Data	33
C. Metode Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	35
1.7. Sistematika Penulisan	36

BAB II EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2.1. Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak	38
2.1.1. Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Pelanggaran	45
2.1.2. Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kejahatan	49
2.2. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Para Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	52

BAB III KENDALA KENDALA PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

3.1. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Menurut Pasal 38 Dan 39

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	58
---	----

3.2. Evaluasi praktek pelaksanaan penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan	64
---	----

BAB 1V PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah iuran kas kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Rachmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta dan ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.¹

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan

¹ Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1988, hal. 12

pelalaian pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang. Dengan demikian, maka “Voluntary Compliance” (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Sementara perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah hukum (Tax Avoidance) maupun melalui upaya penggelapan pajak (Tax Evasion).²

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi Negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik

Penggelapan pajak (tax evasion) sendiri pengertiannya adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (unlawful), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap

² Tri Wibowo, Efektivitas Sanksi Pidana Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, 2009, hal. 1

yurisdiksi. Begitupun penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengandung sanksi pidana dan denda.³ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan untuk selanjutnya disebut UU KUP menyatakan bahwa “pelanggaran pajak” termasuk dalam ayat (1) tidak menyampaikan SPT; dan pada ayat (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU Perpajakan menyatakan bahwa “kejahatan pajak” termasuk dalam ayat (1) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk selanjutnya disingkat NPWP, tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan lain-lain.

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
2. Kendala-kendala apa saja dalam penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 UU KUP?

³ Danang Cahyo, (Artikel internet: <http://www.google.com>), Penggelapan Pajak, Selasa, tanggal 24 April 2012, 14:20

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar UU KUP
2. Untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai kendala dalam penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 UU KUP

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Menjadi kajian praktis mengenai efektivitas sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar UU KUP

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan saran atau informasi mengenai efektivitas sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar UU KUP.
- b. Sebagai informasi tentang kendala dalam penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 UU KUP.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna.

Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

” Efektivitas secara harfiah dapat diartikan sebagai pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sifat atau keadaan

yang mampu memberikan hasil yang memuaskan atau sesuai dengan yang diharapkan.”

Pengertian efektivitas menurut Hidayat, efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Sedangkan Prasetyo Budi Saksono, menyatakan bahwa efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.⁴

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

Ukuran efektivitas sanksi pidana terhadap wajib pajak adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka Sugiyono menyatakan bahwa untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus:

$$a. \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Output Realisasi}}{\text{Output Target}} \geq 1$$

$$b. \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Output Realisasi}}{\text{Output Target}} \leq 1$$

⁴ <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, Alexa, Education, Business, Communication and Information, Selasa, 24 April 2012, 14:35

- a. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.
- b. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih kecil daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

Selain dengan cara diatas juga dapat dijelaskan bahwa efektivitas dapat ditentukan dengan merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client.

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat ialah bahwa peraturan pajak dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Dan yang kelima adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website

pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.⁵

1.5.2. Pajak

1.5.2.1. Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

1. Nighttingale

Menyatakan: A Compulsary contribution, imposed by Governmend, and while tax payers many receive nothing identifiable in return for their contribution, they nevertheless have the benefit of living in a relative by educated, healthy, and save society.”

Dari definisi di atas, pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan pemerintah dan Wajib Pajak (WP) tidak memperoleh kontra prestasi langsung, aka tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman, sejahtera, dan berpendidikan.

2. P. J. A. Andriani dan R. Santoso Brotodiharjo

Menyatakan: ”Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.”

3. Rochmat Soemitro

Menyatakan: “Pajak adalah mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara,

⁵ Widayati dan Nurlis. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, 2010

dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dikatakan bahwa pajak dalam hal demikian mempunyai fungsi budgeter”⁶

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 butir 1

Menyatakan:

”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Dari definisi di atas pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut terdapat 5 (lima) unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain:

- a. Kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara;
- b. Kewajiban yang dapat dipaksakan, kalau tidak dipenuhi dikenakan sanksi;
- c. Dipungut berdasarkan Undang-Undang, apa (objek), oleh siapa (subjek) dan cara menentukan/menghitung jumlah serta tata caranya;
- d. Tidak ada timbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk, imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa pelayanan umum (public service obligation) dan sarana umum (public utility);
- e. Dipungut oleh/dan digunakan untuk keperluan negara;⁸

⁶ Purwanto, Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.2, ISSN:021-969X, 2006, hal. 1

⁷ Ibid

⁸ Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 2

Dengan demikian, bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.⁹

1.5.2.2. Pengertian Hukum Pajak

Pengertian hukum pajak pada garis besarnya dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Mengingat, bahwa hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum tidak melepaskan sanksi hukum didalamnya agar pejabat pajak maupun wajib pajak menaati kaidah hukum sebagai substansinya. Dalam arti, terhadap pejabat pajak maupun wajib pajak yang tidak menaati hukum pajak, negara dapat menerapkan sanksi hukum yang terdapat di dalamnya. Sanksi hukum yang dapat diterapkan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana¹⁰

⁹ Ibid, hal. 3

¹⁰ M. Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 1-2

Disamping pengertian hukum pajak tersebut di atas, Rochmat Soemitro mengemukakan hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Lain perkataan, hukum pajak menerangkan :

1. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak)
2. kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah
3. hak-hak pemerintah
4. objek-objek apa yang dikenakan pajak
5. cara penagihan
6. cara pengajuan keberatan dan sebagainya.¹¹

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).¹²

Sementara itu Bohari mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara

¹¹ Ibid, hal. 2

¹² Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, ANDI, Yogyakarta, 2009, hal 55

pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan:

1. siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak)
2. objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak)
3. kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
4. timbul dan hapusnya utang pajak
5. cara penagihan pajak
6. cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas terlihat bahwa ada yang menyamakan pajak dengan fiskal. Padahal antara keduanya mempunyai perbedaan. Fiskal mencakup seluruh aspek keuangan negara, sementara pajak hanya merupakan salah satu bagian dari keuangan negara secara keseluruhan. Pendapat tersebut diatas juga memperlihatkan bahwa di dalam hukum pajak diatur adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dimana pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak (fiscus) sementara rakyat dalam kedudukannya sebagai subjek pajak/wajib pajak.¹³

Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hukum Pajak Materiil
Yaitu peraturan yang mengatur pajak secara umum (Hukum umum/Lex-Generalis).
Hukum Pajak Materiil ini berupa Undang-Undang Perpajakan.
- b. Hukum Pajak Formil
Yaitu peraturan yang mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dilaksanakan (Hukum Khusus/Lex Specialist).

¹³ Ibid, hal. 56

Hukum Pajak Formil ini disebut juga Peraturan-Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan yang berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Kep. Dirjen. Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak.¹⁴

1.5.2.3. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur).¹⁵

1. Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan

2. Fungsi Mengatur

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi mengatur ini umumnya fiskus menggunakan dua cara, yaitu cara umum dan cara khusus.

a. Cara Umum

¹⁴ Agus Sambodo, Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 2

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, op.cit, hal. 16-19

Cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif pajak untuk mengadakan perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang merupakan persentase atau jumlah yang dikenakan terhadap basis pajak yang berlaku secara umum, dijadikan instrumen perwujudan fungsi pajak ini.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.¹⁶

b. Cara Khusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang bersifat positif (insentif) dan yang bersifat negatif (disinsentif).

1) Bersifat positif (insentif)

Pemerintah biasanya memberikan dorongan (tax-incentive) dalam bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang antara lain dapat berupa:

¹⁶ Hariyo Sulistiyantoro, Penafsiran dan Prosedur Sita Atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia, Perspektif, Vol. 16, ISSN:1410-3648, hal. 56

- a) Pemberian keringanan yang berbentuk tax holiday (pembebasan pajak) dan keringanan pajak;
 - b) Mengadakan afschrijving (penghapusan)
 - c) Pemberian pengecualian-pengecualian
 - d) Pemberian pengurangan-pengurangan
 - e) Kompensasi-kompensasi
- 2) Bersifat negatif (dis-insentif)

Merupakan cara mengatur dengan maksud mencegah atau menghalang-halangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai:

- a) Pemberian hambatan-hambatan;
 - b) Pencegahan atas pemakaian atau pemasukan
- Pemberatan-pemberatan khusus.

1.5.2.4. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 4 kriteria yaitu:¹⁷

1. Dari segi administratif yuridis

a. Segi Yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Segi Ekonomis

¹⁷ Ibid, hal. 9-15

Suatu jenis pajak dikatakan pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Berdasarkan titik tolak pungutannya
 - a. Pajak subjektif
Merupakan pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak).
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Pajak objektif
Merupakan pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak yang bersifat pribadi (persoonlijk)
Merupakan pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak
Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak yang bersifat kebendaan (zakelijk)
Merupakan pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak.
Contoh: Bea Materai
4. Berdasarkan kewenangan pemungutannya
 - a. Pajak Pusat
Merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintahan pusat.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan Cukai.
 - b. Pajak Daerah
Merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Contoh Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

1.5.2.5. Objek Pajak

Objek pajak atau sasaran pengenaan pajak dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut ketentuan Undang-Undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.

1. Keadaan

Pajak dapat dikenakan terhadap suatu keadaan tertentu yang menurut Undang-Undang memang harus dikenakan pajak.

Contoh: Seseorang dalam keadaan memiliki kendaraan bermotor maka akan dikenakan pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Peristiwa

Peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi objek pajak.

Contoh: Peristiwa kematian. Seorang wajib pajak meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan. Peristiwa kematian tersebut membuka adanya warisan. Terhadap perolehan hak karena warisan itu dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

3. Perbuatan

Perbuatan yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi objek pajak apabila telah memenuhi syarat.

Contoh: perbuatan seseorang yang mengikat perjanjian-pinjam-meminjam uang senilai lima juta rupiah, dimana perjanjian itu dibuat secara tertulis, maka dikenakan pajak berupa Bea Materai.¹⁸

1.5.2.6. Pihak Dalam Bidang Pajak

Dalam bidang pajak dikenal beberapa pihak yang saling berhubungan. Mereka adalah Subjek Pajak, Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan Fiskus.

¹⁸ Ibid, hal. 25-26

A. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sementara badan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya¹⁹

B. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak. Sementara syarat subjektif menurut tempatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni yang pertama wajib pajak dalam negeri yaitu wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili di dalam negeri. Yang kedua wajib pajak luar negeri yaitu wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, atau berkedudukan di luar negeri, tetapi memiliki objek pajak di dalam negeri.²⁰

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

¹⁹ Ibid, hal. 20-21

²⁰ Ibid, hal, 22-23

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.²¹

1. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar
- 3) Mengisi SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
- 4) Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperhatikan dan meminjamkan buku dari Catatan, dokumen, yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan²²

b. Hak-Hak Wajib Pajak

- 1) Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Pembanding
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak

²¹ Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Formal Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan, Penagihan, Penyelesaian Sengketa, dan Tindak Pidana Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 1

²² Trisni S dan Tarsis T, Pajak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 22

- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.²³

2. Kuasa Wajib Pajak

Kuasa wajib pajak menurut pasal 32 ayat (3) UU Perpajakan adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa
- c. Memiliki NPWP
- d. Telah menyampikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir dan
- e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.²⁴

²³ Ibid, hal. 23

²⁴ Marihot Pahala Siahaan, op.cit, hal. 13-14

C. Penanggung Pajak

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

1. badan oleh pengurus;
2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
4. badan dalam likuidasi oleh likuidator
5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan wali atau pengampunya.²⁵

D. Fiskus

Istilah fiskus (fiscus) dalam perkembangan terkini sering diartikan sebagai aparatur pemerintah yang menangani pemasukan uang dari rakyat berupa pajak untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan tidak jarang aparatur pemerintah yang berhubungan dengan pajak disebut-sebut oleh masyarakat sebagai fiskus. Jadi disini fiskus tidak hanya menangani pemungutan pajaknya. Bahkan sebenarnya kalau dirunut dari awalnya fiskus berarti kantong uang.²⁶

1.5.2.7. Pembayaran Pajak

A. Cara Pembayaran Pajak

1. Pembayaran Pajak dengan menggunakan Natura

²⁵ Y. Sri Pudyatmoko, op. cit, hal. 23

²⁶ Ibid, hal. 24

Pajak selalu mengikuti perkembangan zaman, baik dalam hal objek pajak maupun cara pembayaran pajak. Pada masa penjajahan dahulu pajak tidak dibayar dengan uang melainkan dalam bentuk natura. Hal ini dapat dilihat dalam sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh penjajah Belanda yang pada dasarnya merupakan pajak tanah. Masyarakat yang dibebani kewajiban pajak tersebut tidak membayar dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk natura, dengan menyerahkan hasil tanah (seperlima dari luas tanah wajib pajak), yang harus ditanami dengan jenis tanaman tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian pembayaran pajak tidak selalu dilakukan dengan membayar sejumlah uang ke kas negara.

2. Pembayaran Pajak dengan menggunakan Uang Tunai

Mengingat saat ini uang sudah menjadi alat pembayaran yang universal dan paling umum digunakan dalam kehidupan masyarakat, maka pembayaran pajak dewasa ini juga dilakukan dalam bentuk uang. Wajib pajak yang akan membayar pajak dapat dengan mudah datang ke tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh pemerintah dan menyerahkan uang pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang telah dihitung oleh wajib pajak sendiri maupun yang ditetapkan oleh fiskus. Pada pajak langsung secara umum beban pajak yang terutang ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Untuk melunasi utang pajaknya maka wajib pajak membayar langsung sejumlah uang tunai tertentu ke kas negara sesuai dengan beban pajak yang dikenakan kepadanya. Pembayaran pajak yang menghapuskan utang pajak terjadi pada saat wajib pajak menyetorkan sejumlah uang tertentu ke tempat pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pembayaran Pajak dengan menggunakan Benda dan Cara Tertentu

Sebagai sarana pembayaran pajak digunakan benda tertentu dan bukan uang tunai. Hal ini dapat dijumpai dalam pemungutan Bea Materai di Indonesia, dimana pajak terutang yang timbul karena dibuatnya dokumen yang membuktikan adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang bersifat perdata, tidak dibayar dengan sejumlah uang tertentu melainkan dengan menggunakan benda materai maupun cara lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Bea Materai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, dimana pengenaan pajak

terjadi secara insidental dan pembayaran pajak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pelunasan Bea Materai terutang dengan menggunakan benda materai dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan materai tempel dan kertas materai. Materai tempel merupakan benda materai berbentuk seperti prangko yang ditempelkan pada dokumen dimaksud dan ditandatangani oleh pihak atau para pihak yang menerima manfaat dari dokumen tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kertas materai adalah kertas yang dapat langsung digunakan untuk membuat dokumen yang diperlukan. Pembuatan dokumen pada kertas materai secara otomatis merupakan pelunasan Bea Materai yang terutang atas dokumen tersebut.

4. Pembayaran Pajak dengan Pemungutan oleh Pihak lain

Cara ini umumnya digunakan dalam PPN, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak tidak langsung lainnya, dimana beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, PPN yang menanggung beban pajak adalah pihak yang menerima penyerahan barang dan jasa kena pajak, dimana apabila terdapat beberapa tingkatan penyerahan sampai dengan konsumen akhir maka beban pajak secara keseluruhan akan ditanggung oleh konsumen akhir. Mekanisme pengenaan PPN di Indonesia menentukan bahwa walaupun beban pajak ditanggung oleh konsumen tetapi yang menyetorkan pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak.²⁷

B. Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

UU KUP pada Pasal 9 ayat (2a) menentukan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Untuk kepentingan pengenaan sanksi bunga ini maka bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

²⁷ Marihot Pahala Siahaan, op.cit, hal. 46-48

Besarnya sanksi ini pada dasarnya sama untuk semua jenis pajak yang berlaku di Indonesia, baik untuk jenis pajak pusat maupun pajak daerah, hanya saja pengaturannya tidak terdapat pada UU KUP melainkan diatur dalam Undang-Undang PBB, BPHTB, dan PDRD.

Selain diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, sanksi karena wajib pajak terlambat membayar pajak juga diatur dalam Pasal 19 UU KUP. Pada Pasal 19 ayat (1) ditentukan bahwa apabila SKPKB atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.²⁸

1.5.2.8. Pengajuan Keberatan

Syarat Pengajuan keberatan menurut Pasal 25 UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007, Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan keberatan ke KPP tempat

²⁸ Ibid, hal. 63

Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan dengan syarat, antara lain:

1. permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. permohonan keberatan harus mencantumkan alasan keberatan beserta jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak;
3. 1 (satu) surat permohonan keberatan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
4. Wajib Pajak telah melunasi jumlah pajak yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan harus dilampirkan dalam surat permohonan;
5. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimkannya surat ketetapan pajak;
6. surat keberatan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.²⁹

1.5.2.9. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang Perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu:

²⁹ Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas, op. cit, hal. 123-124

A. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

a. Bunga 2% per bulan

Sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Lain perkataan, ketika pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.³⁰

Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang

³⁰ M. Djafar Saidi, op.cit, hal. 305

mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.³¹

b. Denda Administrasi

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.³²

c. Kenaikan 50% dan 100%

Dalam Pasal 13 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berbunyi:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;atau
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

Yaitu memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas

³¹ Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, op. cit, hal. 23

³² M. Djafar Saidi, op.cit, hal.312

jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar.³³

B. Sanksi Pidana

Sanksi adalah hukuman yang harus dihadapi ketika melakukan suatu pelanggaran.

Menurut kamus sanksi adalah sebagai berikut:

1 tanggungan (tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dsb): dl aturan tata tertib harus ditegaskan apa — nya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu; 2 tindakan (mengenai perekonomian dsb) sebagai hukuman kepada suatu negara: Dewan Keamanan PBB mengadakan — terhadap negara yang menyerang negara lain; 3 Huk a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum;³⁴

Sementara itu sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.³⁵

Sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia diantaranya terdapat dalam UU KUP. Dalam UU KUP, sanksi pidana terdapat pada Pasal 38 dan 39. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sanksi pidana tersebut, dapat kita lihat isi dari pasal-pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

³³ Ibid, hal. 314

³⁴ <http://falzart.wordpress.com/2011/11/29/diary-sanksi/>, Faizart, Diary Sanksi, Selasa 24 April 2012, 14:25

³⁵ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009, ANDI, Yogyakarta, 2009, hal. 57

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

Pasal 39

1. Setiap orang yang dengan sengaja

- a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ; atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. Memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau
- g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.

3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka

mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Sementara pasal 263 KUHP, menyatakan bahwa Pemalsuan

Surat berbunyi:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak.
- (2) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Unsur-Unsur:

Pasal 263 (1) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Objektif
Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.
2. Subjektif
Dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Objektif
Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau apabila memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Subjektif

Dengan sengaja.

Sesuai dengan Pasal 39 UU KUP apabila wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara, maka diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.³⁶

Menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu:

a. Denda Pidana

Dikenakan pada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ke tiga yang melanggar norma yang bersifat pelanggaran dan kejahatan.

b. Penjara Kurungan

Diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Misalnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti pidana kurungan selama-lamanya sekian. Ditujukan pada wajib pajak dan pihak ke tiga

c. Pidana Penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan terhadap kejahatan, dan dapat ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.³⁷

1.5.2.10. Tata Cara Peradilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan

³⁶ Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, op. cit, hal. 54

³⁷ Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, op. cit, hal. 26

peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut.³⁸

Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan, sebagaimana di bawah ini:

- a. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilakukan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- b. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.
- c. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
- d. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian,

³⁸ Marihot Pahala Siahaan, op.cit, hal. 212

mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.³⁹

Teknik beracara bagi Wajib Pajak:

1. Mengajukan sengketa dengan tertulis dalam Bahasa Indonesia
2. Dalam jangka waktu yang ditentukan
3. Satu surat untuk satu sengketa
4. Banding:
 - a. dalam jangka waktu tiga bulan
 - b. melunasi 50% pajak terutang
5. Gugatan:
 - a. 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak
 - b. 30 hari sejak tanggal keputusan untuk selain pelaksanaan penagihan pajak
 - c. Dapat diperpanjang 14 hari
6. Membuat Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak sebagai jawaban atas Surat Uraian Banding (SUB) – "Surat Tanggapan"⁴⁰

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Pada penelitian hukum normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴¹

Metode penelitian hukum normatif ini digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berlandaskan pada Undang-Undang

³⁹ Ibid, hal. 210-211

⁴⁰ M. Hary Djatmiko, Teknik/Tata Cara Beracara di Pengadilan Pajak, Universitas Narotama, 2009

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal118..

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang,

hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁴² Buku karangan sarjana serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini juga dikumpulkan. Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan huku, pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan

⁴² Ibid, hal. 118

adalah Pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi. Struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.⁴³

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini.

Bab I pendahuluan di dalam sub bab pertama disajikan tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sub bab kedua mengenai perumusan masalah. Selanjutnya disajikan sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada sub bab kelima kajian pustaka yang merupakan landasan teori dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul diatas. Dan sub bab keenam metode penelitian yang merupakan syarat mutlak dalam setiap penelitian ini dibagi menjadi 4 yaitu jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab II pembahasan tentang perumusan masalah yang pertama yaitu mengenai efektivitas dari pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

⁴³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 107.

Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya sub bab kedua diuraikan mengenai efektivitas dari pelaksanaan pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut.

Bab III pembahasan tentang perumusan masalah yang kedua mengenai kendala dalam penerapan sanksi pidana dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sub bab pertama mengenai kendala pelaksanaan, sub bab kedua mengenai evaluasi dari praktek pelaksanaan tersebut.

Bab IV penutup berisi tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.